

Total Banten

••• bicara data, bicara fakta

Makan Minum Pemprov Banten Rp110 Miliar, Bansos Warga Miskin "Pelit"

Wali Kota Serang Dilaporkan
Penipuan dan Penggelapan

Koruptor di Pegadaian Syariah
Diringkus Kejari Tangsel



Harga Rp40 Ribu

- 2 EDITORIAL;**
Data Harus Bicara, Fakta Harus Terdengar
- 3 METROPOLITAN;**
Koruptor di Pengadaian Syariah Diringkus Kejari Tangsel
- 4 LAPORAN UTAMA;**
Anggaran Makan dan Minum Pemprov Banten Rp110 Miliar
- 7 KESEHATAN;**
 - Harga Obat Naik 20 Persen
 - Warga Banten Bergantung ke BPJS PBI untuk Berobat
- 9 SOROTAN;**
 - Ribuan Kendaraan Dinas di Pandeglang Nunggak Pajak
 - Data Perceraian di Banten Tinggi
- 11 HUMANIORA;**
 - Bupati Serang Ngaku Merinding
 - Festival Anyer-Panarukan 2026
- 14 HUKRIM;**
 - Wali Kota Serang Dilaporkan
 - Polisi Sita 73 Kilogram Sabu
- 16 EKONOMI;**
 - KDMP di Kabupaten Serang Terkendala Lahan
- 17 POLITIK/LEGISLATIF;**
 - Dana Hibah Parpol di Kabupaten Serang Jadi Sorotan
 - Rp59 Miliar APBD Kota Serang Diserap DPRD
- 20 SOSOK/GARIS KEBIJAKAN:**
 - Luangkan Waktu Repres Otak
 - Pergub Banten Hanya Jadi Aturan di Atas Kertas
- 22 WISATA/KULINER:**
 - Rabeg, Angeun Lada, hingga Tebing Koja

Data Harus Bicara Fakta Harus Terdengar

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat memperoleh berita. Informasi kini hadir begitu cepat, melintasi ruang dan waktu hanya dalam satu genggam. Namun, kecepatan tidak selalu berjalan beriringan dengan kualitas.

Di tengah deras arus informasi, publik kerap dihadapkan pada berita yang parsial, dangkal, bahkan menyesatkan. Hoaks, disinformasi, misinformasi, dan pemberitaan tanpa verifikasi menjadi tantangan nyata yang dapat mengaburkan kebenaran serta melemahkan kualitas demokrasi.

Berangkat dari kegelisahan tersebut, Total Banten hadir dengan satu keyakinan sederhana: data tidak memiliki kepentingan, dan fakta tidak mengenal keberpihakan.

Karena itulah kami memilih jalan jurnalisme berbasis data dan fakta. Setiap informasi yang kami sajikan dibangun melalui proses verifikasi, konfirmasi, penggunaan data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta berpegang teguh pada etika jurnalistik.

Bagi kami, media bukan sekadar penyampai peristiwa. Media memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan pemahaman, mengurai persoalan secara utuh, menjelaskan kebijakan publik berdasarkan regulasi dan data, serta menjadi ruang dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.

Total Banten tidak berdiri sebagai corong kekuasaan, namun juga bukan oposisi yang reaktif. Kami memilih menjaga jarak yang sehat dengan setiap kepentingan, membuka ruang klarifikasi bagi semua pihak, serta menempatkan kepentingan publik sebagai orientasi utama dalam setiap karya jurnalistik.

Kami percaya bahwa kebijakan publik yang baik hanya dapat lahir dari proses yang transparan, terbuka, dan diawasi secara kritis oleh masyarakat yang memperoleh informasi secara utuh.

Di tengah berbagai keterbatasan, kami tetap berkomitmen menghadirkan karya jurnalistik yang akurat, berimbang, berbasis data, serta dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum. Sebab kami meyakini, informasi bukan sekadar komoditas, melainkan fondasi penting dalam membangun demokrasi, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan mendorong kemajuan Banten.

Selamat membaca.

Redaksi Total Banten

Koruptor di Pegadaian Syariah Diringkus Kejari Tangsel

TOTAL BANTEN - Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran pinjaman gadai syariah di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Pondok Jaya, Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Pondok Aren.

Kepala Kejari Tangerang Selatan, Apreza Darul Putra, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik bidang tindak pidana khusus menemukan alat bukti yang cukup dalam proses penyidikan perkara tersebut. "Kami telah menemukan alat bukti permulaan yang cukup bahwa kedua tersangka diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi yang terjadi pada Februari hingga Maret 2025," kata Apreza dalam keterangan pers, Senin (22/6/2026).

Kedua tersangka masing-masing berinisial TAB dan JI. TAB diketahui menjabat sebagai Kepala UPS Pondok Jaya, sedangkan JI merupakan nasabah yang mengajukan pinjaman gadai dengan menjaminkan 10 barang untuk 10 kontrak pinjaman.

Berdasarkan hasil penyidikan, JI diduga menjalin komunikasi langsung dengan TAB untuk mempermudah proses pencairan pinjaman. Dalam perjalanannya, TAB diduga mengembalikan barang jaminan milik JI tanpa adanya pelunasan atas pinjaman gadai yang masih berjalan. Menurut Apreza, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Namun, besaran kerugian masih menunggu hasil audit yang saat ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Atas perbuatan para tersangka terdapat potensi kerugian keuangan negara yang saat ini masih dalam proses audit," ujarnya. Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 603 dan Pasal 604 juncto Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,



Serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyidik juga melakukan penahanan terhadap tersangka TAB.

Penahanan dilakukan karena penyidik menilai telah terpenuhi syarat subjektif dan objektif, termasuk kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Sementara itu, tersangka JI belum memenuhi panggilan penyidik meski telah dipanggil sebanyak tiga kali secara patut. Kejari Tangsel berencana memasukkan JI ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Untuk mendalami perkara, penyidik melakukan penggeledahan di kantor UPS Pondok Jaya, kantor CPS Pondok Aren di Jalan Ceger Raya, Jurang Mangu Timur, serta rumah salah satu tersangka pada Senin (22/6/2026).

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara, antara lain buku kas tahun 2025 dan catatan transaksi gadai syariah yang sebagian masih dibuat secara manual.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Tangerang Selatan, Samuel, mengatakan seluruh dokumen dan barang bukti yang diperoleh akan diverifikasi dan dianalisis untuk memperkuat konstruksi perkara.

"Seluruh dokumen dan benda yang diperoleh melalui penggeledahan akan dilakukan verifikasi dan analisis mendalam oleh tim penyidik guna mendukung proses penyidikan," kata Samuel. Penyidik masih terus mendalami perkara tersebut untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat maupun memperjelas besaran kerugian negara yang ditimbulkan. "Kasus ini akan terus kami dalami sampai tuntas," pungkasnya.

Anggaran Mamin Pemprov Banten Rp110 Miliar Bansos Warga Miskin 'Pelit'



Ilustrasi warga miskin di Banten. (Ist)

TOTAL BANTEN - Di sudut-sudut perkampungan Provinsi Banten, masih ada keluarga yang harus berhitung cermat untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Sebagian lainnya masih berjuang mencari pekerjaan tetap, sementara tidak sedikit yang menggantungkan hidup dari pekerjaan serabutan dengan penghasilan yang tak menentu.

Hal tersebut dialami salah satunya oleh Rohimat, warga Kabupaten Pandeglang yang menggantungkan hidup dengan cara memulung barang bekas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap pagi, pria berusia 57 tahun tersebut keluar dari rumahnya dengan mendorong gerobak yang menjadi alat membawa barang bekas. Setiap pagi, pria berusia 57 tahun tersebut keluar dari rumahnya dengan mendorong gerobak yang menjadi alat membawa barang bekas.

"Sehari paling dapat uang Rp30 ribu dari menjual barang bekas, ya cukup untuk makan doang untuk lainnya gak ada lagi," kata Rohimat ditemui di Pandeglang, Kamis (25/6/2026). Potret Rohimat hanya sebagian kecil dari kehidupan warga Banten yang masih ada di bawah garis kemiskinan.

Sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten tahun 2025, masih ada 772.780 orang yang hidup di bawah kemiskinan. Namun ironisnya, di saat yang sama Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran Rp110,44 miliar untuk belanja makanan dan minuman pada Tahun Anggaran 2026.

Sedangkan anggaran bantuan sosial untuk warga miskin terbilang "pelit" hanya sebesar Rp18,61 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari bantuan sosial kepada individu sebesar Rp2,15 miliar dan bantuan sosial kepada keluarga sebesar Rp16,46 miliar. Dari total bantuan sosial keluarga itu, Rp12,5 miliar dialokasikan dalam bentuk bantuan tunai kepada 25.000 keluarga penerima manfaat, dengan alokasi Rp500 ribu per keluarga dalam satu tahun atau setara Rp41 ribu per bulan. Sedangkan Rp3,96 miliar diberikan dalam bentuk bantuan barang.

Hal itu tercantum dalam dokumen Peraturan Gubernur Banten nomor 49 tahun 2025, tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Dalam catatan, ada lima pos belanja makan dan minum yang totalnya fantastis. Nilai terbesar berada pada belanja makanan dan minuman jamuan tamu yang mencapai Rp46,78 miliar. Angka itu menjadi yang tertinggi dibandingkan pos lainnya.

Sementara untuk belanja makanan dan minuman rapat dialokasikan sebesar Rp30,75 miliar. Adapun belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan mencapai Rp25,24 miliar. Kemudian makan dan minum aktivitas lapangan Rp5,23 miliar, dan fasilitas pelayanan urusan sosial Rp2,44 miliar. Jika digabungkan, total belanja makan dan minum tersebut mencapai Rp110,44 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Untirta Banten, Ahmad Sururi menilai Pemerintah Provinsi Banten tidak memiliki kepekaan sosial. Sehingga menghambur-hamburkan anggaran untuk belanja yang tidak berdampak secara langsung kepada masyarakat.

Seharusnya kata Sururi, di tengah masih tingginya angka kemiskinan, pemerintah daerah lebih memprioritaskan anggaran pada program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. "Pemerintah Provinsi Banten seharusnya memiliki kepekaan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Kita tahu kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, masih sangat besar," kata Sururi, Kamis (25/6/2026). Ia menilai besarnya alokasi belanja konsumsi birokrasi menjadi kontras dengan kondisi masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Ketika kita melihat ada anggaran makan dan minum mencapai Rp110 miliar, tentu hal ini cukup memprihatinkan. Seharusnya tingkat kepekaan pemerintah daerah lebih diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak dan layak diprioritaskan," katanya.

Sururi juga mempertanyakan rasionalitas anggaran, khususnya pada pos jamuan tamu yang mencapai hampir Rp47 miliar. Menurut dia, kegiatan jamuan tamu >>>

tidak berlangsung setiap hari sehingga nilai anggaran tersebut dinilai terlalu besar jika dibandingkan dengan kebutuhan riil. "Kalau untuk jamuan tamu mencapai sekitar Rp46 miliar, menurut saya itu sangat besar. Jika dihitung berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya dan frekuensi kegiatan yang riil, seharusnya tidak sampai sebesar itu," ujarnya.

Dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran yang tengah didorong pemerintah pusat, Sururi menilai belanja makan dan minum senilai Rp110 miliar belum mencerminkan prinsip penghematan. "Kalau ditanya apakah ini terkesan pemborosan, menurut saya iya. Dalam konteks efisiensi anggaran, alokasi belanja makan dan minum sebesar Rp110 miliar belum mencerminkan prinsip efisiensi dan dapat dikategorikan sebagai pemborosan," pungkasnya.

Masih Tersisa Rp77 M, Ilusi Efisiensi?

Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan menyebut, bantuan pemerintah kepada masyarakat tidak hanya tercermin dalam pos bantuan sosial yang secara spesifik menasar warga miskin. Menurut Deden, terdapat sejumlah program pemerintah yang secara umum juga ditujukan untuk membantu masyarakat, termasuk program sekolah gratis.

"Bansos kita lebih luas. Sekolah gratis juga masuk kategori bantuan," kata Deden kepada Total Banten, Senin (29/6/2026). Ia juga menepis anggapan bahwa seluruh anggaran makan dan minum hanya diperuntukkan bagi kebutuhan birokrasi dan tidak berdampak pada pengentasan 772.780 warga yang masih miskin.

"Kata siapa tidak berdampak? Makan minum itu di antaranya untuk pasien rumah sakit, anak sekolah, atlet di PPLP dan lainnya," ujarnya. Deden menambahkan, anggaran makan dan minum yang tercantum dalam APBD 2026 juga telah mengalami efisiensi. Sedikitnya 30 persen dari alokasi awal telah dipangkas dan dialihkan untuk program prioritas pemerintah daerah.

"Sudah diefisiensi semua. Minimal 30 persen dan dialihkan ke program prioritas," ujarnya. Ia menjelaskan hasil efisiensi tersebut digunakan untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur.

Jika mengacu pada total anggaran makan dan minum sebesar Rp110,44 miliar, maka efisiensi 30 persen setara dengan sekitar Rp33,13 miliar. Dengan demikian, sisa anggaran makan dan minum berada di kisaran Rp77,31 miliar. Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Mahdani menjelaskan bahwa pos bantuan sosial hanya salah satu mata anggaran yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Ia memaparkan alokasi anggaran secara umum, tak spesifik ke anggaran untuk warga yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Pada sektor kesehatan, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran Rp67,81 miliar untuk kontribusi jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran serta Rp232,27 miliar untuk iuran jaminan kesehatan peserta PBU dan BP Kelas III. Di bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan Program Sekolah Gratis (PSG) bagi SMA, SMK dan SKh negeri maupun swasta sebesar Rp345 miliar.

Sementara pada sektor pekerjaan umum dan tata ruang, Pemprov Banten mengalokasikan sekitar Rp320 miliar untuk peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum, termasuk perbaikan jalan lingkungan dan pembangunan drainase. "Selain itu terdapat anggaran Rp17 miliar untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana," katanya.

Mahdani juga menyebutkan adanya Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp52 miliar yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk bantuan sosial tidak terencana apabila diperlukan. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Ahmad Sururi, menilai kebijakan efisiensi tersebut belum sepenuhnya menjawab kritik publik. Bahkan efisiensi tersebut mirip seperti ilusi.

Ia menilai persoalan mendasar justru terletak pada proses perencanaan anggaran yang sejak awal dinilai tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat, terutama warga miskin yang mencapai ratusan ribu di tahun 2025.

"Pertanyaannya, kenapa sejak awal dianggarkan Rp110 miliar? Artinya perencanaan anggarannya sudah tidak pro rakyat. Ketika kemudian dikoreksi, ini lebih merupakan pengakuan atas kekeliruan perencanaan daripada sebuah kebijakan yang dirancang sejak awal," kata Sururi.

Menurut dia, besarnya anggaran tersebut seharusnya dapat diarahkan untuk program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satunya, bantuan sosial untuk warga miskin yang hanya mendapat alokasi sebesar Rp18 miliar.

Padahal lanjut Sururi, nilai anggaran yang tersisa setelah efisiensi maupun sebelum efisiensi dapat digunakan untuk memperluas program penanggulangan kemiskinan, membangun fasilitas kesehatan, memperbaiki sekolah, hingga mempercepat pembangunan infrastruktur dasar. "Angka Rp77 miliar maupun Rp110 miliar itu bisa digunakan untuk membantu warga miskin, membangun puskesmas, merenovasi sekolah, atau memperbaiki jalan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat," ujarnya.

Lebih jauh, Sururi menilai yang perlu dibenahi bukan hanya besaran anggaran, melainkan juga budaya penganggaran yang selama ini berkembang di birokrasi yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. >>>



Sekda Banten, Deden A Hartawan. (Dok)



Pengamat Kebijakan Publik Untirta Banten, Ahmad Sururi. (Dok)

"Yang harus dikoreksi adalah budaya dan pola penganggaran yang kuno seperti jamuan rapat dan konsumsi rapat. Ini merupakan bentuk ketidakadilan anggaran karena belanja yang tidak langsung menyentuh masyarakat justru memperoleh porsi besar," ujarnya.

Sururi menegaskan bahwa permasalahan utama APBD Banten bukan berada pada kebijakan pemangkasan anggaran, melainkan pada penyusunan anggaran sejak tahap awal. "Masalah di Banten bukan soal pemangkasan, tetapi perencanaan awal yang sudah salah. Kenapa tidak sejak awal perencanaan diarahkan pada kebutuhan masyarakat?" katanya.

Ia mendorong pemerintah daerah menerapkan pendekatan anggaran berbasis kebutuhan (needs based budgeting) dan meninggalkan pola penganggaran yang hanya mengacu pada kebiasaan tahun-tahun sebelumnya.

Menurut dia, setiap usulan belanja yang tidak bersifat esensial semestinya disertai argumentasi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. "Belanja makan-minum, sewa hotel, maupun perjalanan dinas harus dilengkapi justifikasi tertulis yang jelas dan terukur. Jangan hanya karena kegiatan serupa pernah dianggarkan pada tahun sebelumnya," ujarnya.

Sururi juga mendorong pemerintah daerah untuk mengalihkan anggaran yang dinilai kurang prioritas ke sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan. Menurut dia, APBD seharusnya menjadi instrumen pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar menopang kebutuhan operasional birokrasi.

"Prinsipnya, APBD bukan untuk memperkaya aparatur, tetapi sebagai instrumen pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat luas," kata Sururi. Ia bahkan menilai persoalan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan proses penyusunan anggaran yang melibatkan eksekutif dan legislatif.

Menurut dia, partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan anggaran masih belum optimal sehingga prioritas belanja publik sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan warga. ***"Ini sudah menjadi persoalan yang bersifat struktural. Ada desain penganggaran yang melibatkan eksekutif dan legislatif, sementara partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas anggaran masih sangat terbatas," ujarnya.***

Terpisah, Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa, turut menyoroti ketimpangan anggaran makan dan minum dengan bantuan sosial. Ia menegaskan, APBD seharusnya lebih berpihak kepada rakyat. Ketika ketimpangan tersebut terjadi, wajar publik mempertanyakan tentang prioritas anggaran di Pemprov Banten.

"Wajar publik mempertanyakan hal tersebut, apalagi masih ada ratusan ribu warga Banten yang hidup dalam kemiskinan. Saya berharap APBD lebih berpihak kepada rakyat, jangan sampai masyarakat kurang mampu merasa dianaktirikan oleh Pemerintah," ujarnya.

Menurut Yeremia, bantuan sosial tidak bisa dipandang sekadar sebagai pos anggaran dalam APBD. Bantuan sosial memiliki fungsi strategis sebagai jaring pengaman bagi kelompok masyarakat rentan. "Bantuan sosial bukan sekadar angka dalam APBD, melainkan jaring pengaman bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, lansia terlantar, penyandang disabilitas, keluarga miskin, dan kelompok rentan lainnya," katanya.

Menurut dia, pola penganggaran yang hanya berorientasi pada pembagian pagu anggaran kepada organisasi perangkat daerah (OPD) berpotensi membuat belanja daerah kurang efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

"Sistem penganggaran harus menerapkan prinsip money follows priority dan money follows program. Jangan hanya berdasarkan alokasi pagu ke masing-masing OPD. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus diukur dari manfaatnya bagi masyarakat," katanya. Ia juga mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap berbagai belanja operasional untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran. "Belanja operasional harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efisiensi. Hasil efisiensi itu kemudian dialihkan kepada program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat, seperti bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja," pungkasnya. (Eks/Red)


Direktur RSUD dr. Dradjat Prawiranegara (RSDP), Rachmat Setiadi

Harga Obat Naik 20 Persen

RSDP Kabupaten Serang Amankan Stok dan Pelayanan Pasien

TOTAL BANTEN - Kenaikan harga obat mulai dirasakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Serang. Sejumlah jenis obat mengalami kenaikan harga yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 20 persen, bahkan terdapat beberapa item yang mengalami lonjakan harga lebih tinggi.

Direktur RSUD dr. Dradjat Prawiranegara (RSDP), Rachmat Setiadi, mengatakan kenaikan tersebut tidak terjadi pada seluruh jenis obat. Meski demikian, rumah sakit tetap memastikan ketersediaan obat bagi pasien sebagai prioritas utama pelayanan. "Rata-rata memang ada kenaikan harga obat, tetapi tidak semuanya. Kami tetap harus menyediakan obat sesuai kebutuhan pasien karena itu merupakan kewajiban rumah sakit," ujar Rachmat saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (1/7/2026).

Menurut Rachmat, besaran kenaikan harga berbeda pada setiap jenis obat. Sebagian mengalami kenaikan sekitar 10 persen hingga 20 persen, sementara beberapa jenis obat mengalami perubahan harga yang cukup signifikan. "Ada yang naik 10 persen, ada yang 20 persen. Bahkan ada obat yang sebelumnya sekitar Rp10.000 menjadi Rp20.000. Jadi memang tergantung jenis obatnya," katanya.

Kendati biaya pengadaan meningkat, pihak rumah sakit menegaskan pelayanan kepada pasien tidak akan dikurangi. Pengadaan obat dan bahan habis pakai medis tetap menjadi prioritas utama agar pelayanan kesehatan berjalan optimal.

"Kami tetap memprioritaskan pengadaan obat dan bahan habis pakai untuk pasien, baik pasien operasi, tindakan medis, maupun pelayanan lainnya. Bagaimanapun obat harus tersedia," ujarnya.

Rachmat menambahkan, sejumlah obat untuk penyakit kronis dan kondisi darurat wajib selalu tersedia. Di antaranya obat jantung, diabetes, penyakit ginjal, hingga tuberkulosis (TBC). Ketersediaan obat-obatan tersebut dinilai sangat penting untuk menjaga keberlangsungan terapi pasien.

"Kalau obat tidak tersedia, pasien tentu tidak bisa melanjutkan pengobatan. Itu yang harus kami hindari karena bisa berdampak pada proses penyembuhan pasien," katanya. Ia menilai kenaikan harga obat secara umum masih berada dalam batas yang dapat dikendalikan. Pemerintah pusat melalui mekanisme pengadaan nasional dan pengawasan regulator masih berperan dalam menjaga stabilitas harga obat.

Pemerintah pusat melakukan pengendalian melalui sistem pengadaan dan pengawasan, sehingga kenaikannya tidak terlalu tinggi. Ini cukup membantu fasilitas kesehatan," ujar Rachmat.

Menurutnya, salah satu faktor yang memengaruhi kenaikan harga obat di tingkat distribusi adalah meningkatnya biaya transportasi dan logistik operasional, termasuk dampak penyesuaian kebijakan penggunaan bahan bakar.

Selain menyoroti persoalan harga obat, Rachmat menilai peningkatan kualitas pelayanan kesehatan juga harus dibarengi dengan peningkatan literasi masyarakat. Pendidikan, menurutnya, menjadi fondasi penting agar masyarakat memahami prosedur pelayanan medis di rumah sakit.

"Pendidikan menjadi hal yang paling utama. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik, mereka akan mengerti proses pelayanan medis, mulai dari penanganan awal hingga antrean ruang perawatan. Kesepahaman itu yang terus kami bangun," pungkasnya. **(Pung/Red)**

Warga Banten Masih Bergantung pada BPJS PBI untuk Berobat

DPRD: Alarm Kesejahteraan Belum Menyala Merata

TOTAL BANTEN - Di balik tingginya cakupan jaminan kesehatan di Provinsi Banten, tersimpan potret lain yang patut menjadi perhatian pemerintah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten menunjukkan mayoritas masyarakat masih mengandalkan program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), yakni skema jaminan kesehatan yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Rata-rata 73,85 persen penduduk kabupaten dan kota di Banten tercatat sebagai peserta BPJS PBI. Angka tersebut menjadikan program bantuan pemerintah sebagai instrumen utama perlindungan kesehatan masyarakat.

Namun, tingginya angka kepesertaan itu tidak hanya dapat dibaca sebagai keberhasilan perluasan cakupan layanan kesehatan, melainkan juga menjadi indikator masih besarnya jumlah masyarakat yang belum mampu membayar iuran kesehatan secara mandiri. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Yeremia Mendrofa, menilai kondisi tersebut mencerminkan dua realitas yang berjalan bersamaan.

Di satu sisi, keberadaan BPJS PBI terbukti menjadi jaring pengaman sosial yang sangat dibutuhkan masyarakat. Di sisi lain, tingginya ketergantungan terhadap bantuan iuran pemerintah menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah besar dalam meningkatkan kesejahteraan warga. "Mayoritas warga Banten masih mengandalkan BPJS PBI untuk memperoleh layanan kesehatan. Ini menunjukkan program tersebut memang sangat dibutuhkan.

Namun, kondisi ini juga menjadi alarm bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di sejumlah wilayah masih perlu ditingkatkan melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, serta program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran," ujar Yeremia kepada Total Banten, Senin (22/6/2026). Menurutnya, akses terhadap layanan kesehatan tidak bisa dipisahkan dari kondisi ekonomi masyarakat. Karena itu, kebijakan kesehatan harus berjalan beriringan dengan strategi peningkatan kesejahteraan.

"Ketika masyarakat masih bergantung pada bantuan pemerintah untuk membayar iuran kesehatan, berarti persoalan ekonomi dan kesehatan masih saling terkait erat. Pemerintah perlu memastikan keduanya ditangani secara bersamaan," katanya.

Data BPS juga memperlihatkan adanya disparitas kepesertaan BPJS PBI antarwilayah di Banten. Kota Tangerang menjadi daerah dengan persentase peserta BPJS PBI tertinggi mencapai 90,30 persen. Disusul Kota Tangerang Selatan sebesar 83,95 persen dan Kota Cilegon 80,20 persen.

Sementara di wilayah lain, persentasenya lebih rendah. Kabupaten Tangerang tercatat 74,57 persen, Kota Serang 67,04 persen, Kabupaten Lebak 66,10 persen, Kabupaten Serang 59,07 persen, dan Kabupaten Pandeglang 52,55 persen. Menurut Yeremia, perbedaan tersebut mencerminkan karakteristik sosial ekonomi yang berbeda di setiap daerah.

"Ketimpangan kepesertaan antarwilayah harus menjadi perhatian. Setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda sehingga kebijakan perlindungan sosial juga perlu disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat," ujarnya.

Ia mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan sosial yang lebih akurat agar distribusi bantuan kesehatan benar-benar tepat sasaran dan mampu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Selain soal tingginya ketergantungan masyarakat terhadap BPJS PBI, DPRD Banten juga menyoroti persoalan

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, Dr Yeremia Mandrofa.(dok)

pemutakhiran data kepesertaan yang menyebabkan ratusan ribu peserta mengalami penonaktifan dalam beberapa waktu terakhir. Yeremia menegaskan validasi data memang diperlukan untuk memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak. Namun proses tersebut harus dilakukan secara transparan, bertahap, dan disertai sosialisasi yang memadai.

"Jangan sampai masyarakat baru mengetahui status kepesertaannya tidak aktif saat sedang membutuhkan pelayanan kesehatan. Kondisi seperti itu dapat menimbulkan persoalan baru bagi warga yang membutuhkan pertolongan medis," katanya. Ia meminta pemerintah memastikan mekanisme pembaruan data tidak menghilangkan hak masyarakat terhadap akses layanan kesehatan hanya karena persoalan administratif. Selain BPJS PBI, sebagian masyarakat Banten juga memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Menariknya, Kota Cilegon menjadi daerah yang paling menonjol dalam kategori ini. Sebanyak 55,51 persen penduduk Kota Cilegon tercatat memiliki perlindungan melalui Jamkesda.

Angka tersebut jauh melampaui daerah lain seperti Kota Tangerang yang hanya 1,26 persen, Kota Tangerang Selatan 3,68 persen, Kabupaten Pandeglang 0,36 persen, serta rata-rata Banten yang berada di angka 2,70 persen. **(Eks/Red)**



Ilustrasi; Kendaraan Dinas di Pandeglang. (Dok)

SOROTAN

1.165 Mobil Dinas di Pandeglang Belum Bayar Pajak

TOTAL BANTEN - Sebanyak 1.165 kendaraan dinas yang berada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, pemerintah desa, dan instansi vertikal tercatat belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Jumlah tersebut terbilang besar jika dibandingkan dengan total kendaraan dinas yang tercatat sebanyak 1.389 unit.

Artinya, baru sekitar 224 kendaraan yang telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang, Gimas Rahadyan, membenarkan masih banyak kendaraan dinas yang belum membayar pajak. "Total kendaraan dinas yang tercatat sebanyak 1.389 unit, terdiri dari 955 kendaraan roda dua, empat kendaraan roda tiga, 397 kendaraan roda empat, dan 33 kendaraan roda enam," kata Gimas melalui pesan *WhatsApp*, Rabu (24/6/2026).

"Sebanyak 321 unit merupakan kendaraan dinas desa dan instansi vertikal, sedangkan 844 unit lainnya merupakan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang," ujarnya.

Gimas menjelaskan, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan seluruh kendaraan menunggak pajak. Sebab, masa berlaku dan jatuh tempo pajak setiap kendaraan berbeda-beda. Menurut dia, pembayaran pajak kendaraan dinas telah dianggarkan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk kendaraan yang masih operasional.

Sementara kendaraan yang sudah tidak digunakan masuk kategori rusak berat dan sedang dalam proses penghapusan aset. Besarnya jumlah kendaraan yang belum membayar pajak berpotensi mengurangi optimalisasi penerimaan daerah dari sektor opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Padahal, sebagian penerimaan PKB akan kembali ke sebagai PAD.

"Kalau kendaraan sudah tidak digunakan, berarti masuk kategori rusak berat dan perlu proses penghapusan setelah dilakukan rekonsiliasi sebagai dasar barang milik daerah yang akan dilelang," katanya.

Meski demikian, tingginya jumlah kendaraan yang belum membayar pajak tetap menjadi perhatian. Terlebih, pemerintah daerah saat ini terus mendorong peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

"Prinsipnya kami akan mengoptimalkan pembayaran pajak daerah ini, khususnya kendaraan dinas Pemkab Pandeglang, karena opsen PKB tentunya akan kembali ke Pemkab masing-masing sebagai Pendapatan Asli Daerah," ujar Gimas. (Gun/Red)





Ilustrasi; Perceraian di Banten. (Dok)

Data Perceraian di Banten Tinggi

Dipicu Perselisihan, Ekonomi, Judi Hingga Murtad

TOTAL BANTEN - Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus masih menjadi faktor dominan penyebab perceraian di Provinsi Banten. Data perkara perceraian menunjukkan sebagian besar pasangan yang berpisah mengakhiri rumah tangganya setelah mengalami konflik berkepanjangan yang tidak terselesaikan. Berdasarkan data akumulasi kabupaten dan kota di Banten tahun 2025, tercatat 15.400 perkara perceraian dengan berbagai faktor penyebab. Dari jumlah tersebut, 12.134 kasus atau sekitar 78,8 persen dipicu oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Sementara itu, faktor ekonomi menjadi penyebab terbesar kedua dengan 2.115 kasus atau sekitar 13,7 persen dari total perkara perceraian yang tercatat. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi finansial, tetapi juga oleh kualitas komunikasi dan kemampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik.

Kabupaten Tangerang menjadi daerah dengan jumlah perkara perceraian tertinggi di Banten, yakni 4.015 kasus. Dari jumlah tersebut, 3.128 kasus disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sedangkan 543 kasus dipicu oleh faktor ekonomi. Posisi berikutnya ditempati Kota Tangerang dengan 2.594 kasus, Kabupaten Serang sebanyak 2.160 kasus, dan Kota Tangerang Selatan dengan 1.932 kasus. Di Kabupaten Serang, faktor ekonomi tercatat cukup menonjol dengan 646 kasus, jumlah yang menjadi salah satu tertinggi di tingkat kabupaten dan kota.

Angka tersebut hanya berada di bawah Kabupaten Tangerang yang mencatat 543 kasus, namun secara proporsional memberikan kontribusi besar terhadap total perceraian di wilayah tersebut. Selain perselisihan dan ekonomi, sejumlah faktor lain juga tercatat menjadi penyebab perceraian. Di antaranya perjudian sebanyak 206 kasus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 248 kasus, meninggalkan salah satu pihak 556 kasus, poligami 42 kasus, serta murtad atau perpindahan agama sebanyak 30 kasus.

Kasus perceraian yang dipicu oleh penyalahgunaan minuman keras tercatat sebanyak 29 perkara, sedangkan narkoba atau madat sebanyak 11 perkara. Faktor zina tercatat 4 kasus, kawin paksa 4 kasus, dan cacat badan sebanyak 4 kasus. Pengamat sosial keluarga menilai tingginya angka perceraian akibat perselisihan menunjukkan perlunya penguatan ketahanan keluarga melalui pendidikan pranikah, layanan konseling, serta peningkatan literasi komunikasi dalam rumah tangga.

Di sisi lain, masih tingginya perceraian karena faktor ekonomi memperlihatkan bahwa tekanan biaya hidup dan ketidakstabilan pendapatan keluarga juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Data tersebut menggambarkan bahwa persoalan perceraian di Banten merupakan isu multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh persoalan sosial, ekonomi, dan psikologis keluarga. **(Red)**





Bupati Serang, Ratu Rachmatu Zakiyah saat Menjemput Jemaah Haji. (Dirhat)

Bupati Serang Ngaku Merinding Jemput Tamu Allah!

TOTAL BANTEN - Senyum sumringah menghiasi wajah ratusan jemaah haji asal Kabupaten Serang saat tiba di Gedung El Hajj, Kota Tangerang, Senin (8/6/2026) sekitar pukul 12.30 WIB. Di balik wajah yang tampak lelah setelah menempuh perjalanan panjang dari Tanah Suci, tersimpan kebahagiaan karena akhirnya kembali menginjakkan kaki di tanah air dan berkumpul dengan keluarga.

Satu per satu jemaah turun dari bus yang membawa mereka dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebagian melambaikan tangan kepada kerabat yang telah menunggu sejak pagi.

Sebagian lainnya terlihat menundukkan kepala, mengucap syukur setelah menuntaskan rukun Islam kelima yang selama ini mereka impikan.

Di tengah suasana haru itu, Bupati Serang Ratu Rachmatu Zakiyah hadir langsung menyambut kepulangan para jemaah. Kehadirannya menjadi perhatian tersendiri, karena selama puluhan tahun para jemaah haji belum pernah disambut kepala daerah saat pulang dari tanah suci.

Ratu Zakiyah terlihat berdiri di antara para jemaah, menyalami mereka satu per satu sambil menanyakan kondisi kesehatan setelah menjalani ibadah haji.

Ratu Zakiyah mengaku memiliki alasan khusus mengapa dirinya memilih hadir langsung menjemput para jemaah haji. "Alasannya saya senang menjemput tamu-tamu Allah yang telah beribadah haji. Ini merinding nih, kalau sudah mendengar tamu Allah itu sudah berbeda ya. Buat saya ini suatu kebanggaan karena bisa langsung menjemput jemaah haji dari Kabupaten Serang," ujarnya.

Bagi Zakiyah, para jemaah yang baru pulang dari Tanah Suci bukan sekadar warga yang kembali dari perjalanan luar negeri. Mereka adalah tamu Allah yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji, sebuah perjalanan spiritual yang menjadi dambaan jutaan umat Islam.

Di tengah kebahagiaan menyambut kepulangan para jemaah, Zakiyah juga menyampaikan duka mendalam atas wafatnya satu jemaah asal Kabupaten Serang saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.

"Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Saya juga ingin menyampaikan duka mendalam karena dari 391 jemaah Kloter 6 ada satu jemaah haji yang meninggal dunia," katanya. Meski demikian, secara umum pelaksanaan ibadah haji tahun ini dinilai berjalan lancar. Berdasarkan informasi yang diperoleh langsung dari para jemaah, tidak ada kendala berarti selama berada di Tanah Suci.

Tadi saya tanyakan kepada mereka, alhamdulillah tidak ada kekurangan satu apa pun, baik dari segi logistik maupun tempat di sana," ungkapnya. Dalam perjalanan menuju Kabupaten Serang, rombongan jemaah sempat mengalami insiden kecelakaan lalu lintas. Namun, Zakiyah memastikan kondisi para jemaah yang terdampak telah mendapatkan penanganan medis.

"Memang tadi betul ada sedikit kecelakaan. Langsung kita rawat dan semoga segera sembuh," ujarnya. Salah satu jemaah, Ubaidillah, tak mampu menyembunyikan rasa harunya melihat para jemaah kembali dalam keadaan selamat. **(Dir/Red)**

Festival Anyer-Panarukan Kabupaten Serang

Hidupkan Kembali Jejak Sejarah yang Menyatukan Pulau Jawa

TOTAL BANTEN - Debur ombak Pantai Anyer tidak hanya menyimpan pesona wisata, tetapi juga jejak sejarah yang telah menghubungkan Pulau Jawa selama lebih dari dua abad. Dari kawasan inilah titik awal Jalan Anyer-Panarukan bermula, sebuah jalur legendaris yang menjadi simbol konektivitas, mobilitas, dan perkembangan peradaban di Pulau Jawa.

Menjelang Hari Jadi Kabupaten Serang ke-500 tahun, Pemerintah Kabupaten Serang berupaya menghidupkan kembali semangat sejarah tersebut melalui penyelenggaraan Festival Anyer-Panarukan yang akan menjadi salah satu agenda unggulan sepanjang tahun 2026.

Persiapan festival dibahas dalam rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang digelar di Ruang Rapat Asda II Kabupaten Serang, Kamis (2/7/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Asisten Daerah (Asda) II Kabupaten Serang, Febriyanto, yang juga bertindak sebagai koordinator rangkaian kegiatan Festival Anyer-Panarukan.

Febriyanto mengatakan, festival ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan upaya membangun kesadaran sejarah sekaligus memperkuat identitas Kabupaten Serang sebagai titik awal jalur bersejarah Anyer-Panarukan. "Festival ini menjadi momentum untuk memperkenalkan kembali sejarah Anyer sebagai gerbang barat Pulau Jawa yang memiliki nilai strategis dalam perjalanan bangsa. Kami ingin kegiatan ini melibatkan seluruh unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pelaku pariwisata," kata Febriyanto dalam rapat koordinasi tersebut.

Menurutnya, dukungan konkret dari seluruh OPD menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan festival. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta menyusun program pendukung sesuai tugas dan fungsi masing-masing agar rangkaian kegiatan dapat berlangsung optimal. Lebih dari sekadar perayaan, Pemkab Serang juga menginginkan adanya warisan yang dapat dikenang masyarakat. Salah satu gagasan yang tengah dipersiapkan adalah

pembangunan atau peresmian sebuah penanda monumental pada puncak acara sebagai simbol kontribusi Kabupaten Serang dalam merawat sejarah Anyer-Panarukan. Nama Anyer dan Panarukan memiliki tempat tersendiri dalam catatan sejarah Indonesia. Jalur yang menghubungkan ujung barat dan timur Pulau Jawa tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan konektivitas antardaerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi, perdagangan, budaya, dan mobilitas masyarakat.

Karena itulah, Festival Anyer-Panarukan tidak hanya akan menampilkan hiburan dan atraksi wisata, tetapi juga mengangkat nilai sejarah, budaya, dan potensi ekonomi daerah. Salah satunya menghadirkan Ciomas Ngabring, salah satu tradisi budaya khas Kabupaten Serang yang telah dikenal luas masyarakat Banten.

Rangkaian kegiatan yang disiapkan cukup beragam. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian akan menghadirkan festival pangan, pasar tani, parade swasembada, serta cipta menu berbasis pangan lokal.

Sementara Diskoumperindakop menyiapkan festival kuliner, gebyar UMKM, dan pasar murah yang melibatkan pelaku usaha lokal.

Di sektor pelayanan publik, DPMPSTP Kabupaten Serang akan memberikan layanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi 500 pelaku usaha, pelayanan usaha mikro, hingga berbagai kemudahan perizinan. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sejalan dengan semangat peringatan 500 tahun Kabupaten Serang.

Tidak hanya itu, sejumlah pertunjukan budaya juga akan menjadi daya tarik utama festival. Sedikitnya 500 penari dari Kecamatan Padarincang direncanakan tampil dalam pertunjukan tari kolosal yang akan dipadukan dengan berbagai penampilan seni dari sanggar-sanggar budaya di Anyer, Ciruas, Jawilan, dan Cikande. Selain memastikan kondisi jalan di jalur festival tetap layak dan nyaman dilalui, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang juga menyatakan kesiapan mendukung

program sosial yang menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi Kabupaten Serang ke-500 tahun. Dukungan tersebut diwujudkan melalui fasilitasi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis bagi masyarakat kurang mampu yang menjadi penerima program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Program ini ditargetkan menghasilkan 500 sertifikat PBG yang rencananya akan diserahkan secara simbolis pada puncak perayaan HUT ke-500 Kabupaten Serang. Pemkab Serang juga tengah mempersiapkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai daerah tujuan akhir jalur Anyer-Panarukan.

Kerja sama tersebut akan dituangkan dalam nota kesepahaman yang menjadi landasan pelaksanaan festival dan berbagai program lanjutan di bidang pariwisata, kebudayaan, komunikasi informasi, serta pengembangan UMKM. Febriyanto berharap Festival Anyer-Panarukan dapat menjadi agenda tahunan yang tidak hanya memperkuat identitas sejarah Kabupaten Serang, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.

"Kami ingin festival ini menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Serang sekaligus menjadi magnet wisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara ke kawasan Anyer dan sekitarnya," ujarnya. Di usia Kabupaten Serang yang memasuki 500 tahun, Anyer kembali diposisikan sebagai titik awal sebuah perjalanan. Bukan lagi perjalanan fisik yang membentang hingga Panarukan, melainkan perjalanan untuk memperkuat sejarah, budaya, dan masa depan daerah yang berakar pada kebesaran masa lalu. **(Pung/Red)**



Peta Anyer-Panarukan (Total Banten)



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Bertanggung Jawab, Berkompetensi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

Selamat Memperingati **HARI BHAYANGKARA**

20

Tahun Mengabdikan **POLRI**

Untuk Masyarakat

01 JULI 2026



H. Moch, Hasbi A. Jayabaya, S.H.
Bupati Kabupaten Lebak

Ir. H. Amir Hamzah, M.Si.
Wakil Bupati Kabupaten Lebak

Wali Kota Serang Dipolisikan

Polda Banten Hentikan Penyelidikan



Wali Kota Serang, Budi Rustandi. (Dok)

TOTAL BANTEN - Polemik kepemilikan lahan SDN Kuranji di Kecamatan Taktakan, Kota Serang, kembali mengemuka setelah pihak yang mengaku sebagai ahli waris melaporkan Wali Kota Serang Budi Rustandi ke Polda Banten.

Namun di tengah proses hukum yang berjalan, Pemerintah Kota Serang menegaskan bahwa penerbitan sertifikat atas lahan sekolah tersebut merupakan bagian dari upaya pengamanan aset daerah yang menjadi kewajiban pemerintah.

Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan langkah yang ditempuh pemerintah daerah tidak dilakukan secara sepihak. Proses sertifikasi, menurut dia, merupakan tindak lanjut dari program penataan aset yang selama ini didorong pemerintah pusat, termasuk melalui pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Budi, pemerintah telah berupaya menyelesaikan persoalan melalui jalur mediasi. Namun upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan yang dapat menjadi dasar penyelesaian sengketa. "Dilakukan mediasi, tetapi tidak ada kesepakatan.

Kemudian disarankan menempuh gugatan. Namun mereka mencabut gugatannya," ujar Budi saat dihubungi, Selasa (30/6/2026). Budi menegaskan, selama tidak terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan tanah tersebut milik pihak lain, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjaga serta mengamankan aset yang berada dalam penguasaannya.

"Sebagai pejabat negara, saya wajib mengamankan aset negara. Kalau saya menyerahkan begitu saja tanpa ada putusan pengadilan, itu justru salah. Saya menjalankan tugas sebagai kepala daerah," katanya. Laporan terhadap Budi Rustandi tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/246/VI/SPKT II.DITRESKRIMUM/2026/POLDA BANTEN tertanggal 9 Juni 2026.

Dalam laporannya, ahli waris mengklaim sebagai pemilik sah tanah seluas sekitar 3.352 meter persegi berdasarkan C Nomor 509 Blok 19 di Kelurahan Kuranji. Sebagian lahan disebut telah digunakan pemerintah sejak 1977

untuk pembangunan SDN Kuranji, sementara sisanya masih berupa tanah kosong. Namun di tengah proses penyelidikan, Polda Banten menghentikan penyelidikan dugaan penipuan dan penggelapan sengketa lahan SDN Kuranji yang sempat menyeret nama Wali Kota Serang, Budi Rustandi. Penyidik menyimpulkan tidak ditemukan unsur pidana dalam perkara yang dilaporkan kuasa hukum ahli waris lahan tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setyawan, mengatakan penghentian penyelidikan dilakukan setelah penyidik menggelar serangkaian pemeriksaan dan gelar perkara khusus yang melibatkan ahli pidana serta unsur pengawasan internal kepolisian.

"Hasil penyelidikan ditemukan fakta bahwa perkara ini sepakat untuk kita hentikan penyelidikannya karena tidak ditemukan unsur tindak pidana," kata Dian di Mapolda Banten, Kamis (9/7/2026). **(Dir/Red)**

Polisi Sita 73 Kg Sabu Dimusnahkan dalam HANI di Banten

TOTAL BANTEN - Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Banten membongkar jaringan peredaran narkoba lintas provinsi dengan menyita lebih dari 73 kilogram sabu, ganja, serta cartridge vape yang mengandung etomidate. Barang haram tersebut hasil pengungkapan kasus selama Januari hingga Juni 2026. Narkoba ini kemudian dimusnahkan dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2026.

Barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas sabu seberat 73,2 kilogram, ganja 6,3 kilogram, serta 25 cartridge vape berisi zat etomidate. Seluruh barang bukti tersebut berasal dari lima laporan polisi yang berhasil diungkap sepanjang semester pertama 2026.

Kegiatan pemusnahan ini turut dihadiri Wakapolda Banten Brigjen Pol Hendra Wirawan, Kepala BNN Provinsi Banten, Kejati Banten, Balai Besar POM, hingga perwakilan MUI Banten.

Wakapolda Banten, Brigjen Hendra menegaskan bahwa momentum HANI menjadi penguatan komitmen dalam pemberantasan narkoba. "Pada momentum Hari Anti Narkoba Internasional Tahun 2026, Polda Banten menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran gelap narkoba hingga ke akar-akarnya," ujar Brigjen Hendra, Kamis (2/7/2026).

Selain itu, Polda Banten mengungkap 212 kasus kejahatan konvensional (C3) dari 267 laporan polisi yang diterima selama Januari hingga Juni 2026. Polda Banten juga mencatat penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 58 persen dan pelanggaran lalu lintas sebesar 69 persen selama pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Capaian tersebut dipaparkan dalam rilis kinerja Semester I Tahun 2026 yang disampaikan bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-80 di Aula Gawe Kita Baluwarti Polda Banten, Kota Serang, Rabu (1/7/2026). Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea, mengatakan tingkat penyelesaian perkara tindak pidana C3 mencapai 79 persen dan pengungkapan jaringan narkoba lintas provinsi diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 332 ribu jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

"Seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh personel



Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea

Polda Banten beserta jajaran Polres hingga Polsek. Kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat penegakan hukum yang profesional, serta menghadirkan Polri yang Presisi, humanis, dan semakin dipercaya masyarakat," ujar Maruli. Selain penegakan hukum, Polda Banten juga mencatat capaian pada sektor ketahanan pangan. Program penanaman jagung dikembangkan di lahan seluas lebih dari 3.100 hektare dengan hasil panen yang telah diserap Bulog mencapai hampir 1.200 ton.

Di bidang pelayanan masyarakat, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melampaui target. Dari target awal sebanyak 18 unit, hingga akhir Juni 2026 telah terdaftar 76 SPPG. Program sosial lainnya juga terus berjalan. Polda Banten membangun enam unit rumah layak huni, dengan dua unit telah selesai dan empat lainnya masih dalam proses pengerjaan. Sementara Program Jembatan Merah Putih Presisi telah merealisasikan pembangunan 58 jembatan dari target 65 unit.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat, Direktorat Binmas Polda Banten melanjutkan Program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Hingga Semester I 2026, program tersebut telah dilaksanakan dalam enam gelombang dengan jumlah peserta mencapai 567 orang.

Di sektor tindak pidana khusus, Direktorat Reserse Kriminal Khusus juga mengungkap sejumlah kasus pertambangan ilegal serta penyalahgunaan BBM dan

LPG bersubsidi yang merugikan negara. Atas berbagai capaian tersebut, Polda Banten menerima Tanda Kehormatan Samkarya Nugraha Sakanti dari Presiden Republik Indonesia. Institusi ini juga memperoleh penghargaan dari Menteri Perhubungan, Pemerintah Provinsi Banten, dan DPRD Provinsi Banten atas keberhasilan mengamankan arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Maruli mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan darurat Kepolisian 110 apabila membutuhkan bantuan.

"Layanan 110 dapat diakses secara gratis selama 24 jam. Kami siap memberikan pelayanan terbaik dan menghadirkan rasa aman bagi masyarakat," katanya. **(Dir/Red).**

Total Banten
— bicara data, bicara fakta —

MEDIA PARTNER
DAILYHITS.ID
KERASI ANAK MUJID

TUNA
GAME FISHING
COMPETITION
#2
Tanjung Lesung
2026

TUNA
GAME FISHING
COMPETITION
#2
Tanjung Lesung
2026

📍 **KEK Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten**

📅 **Tanggal : 1 Agustus 2026**

🕒 **Jam : (05.30 s/d Selesai)**

📞 **More information: 081910588826 (Endang)**

Ratusan KDMP Terkendala Lahan, Apa Solusinya ?



Kabid Koperasi pada Diskoumperindag Kabupaten Serang, Mokhamad Rifki

TOTAL BANTEN - Upaya penyediaan lahan untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Serang masih menghadapi tantangan. Dari total 326 desa yang telah membentuk KDMP, sebanyak 142 koperasi desa tercatat belum memiliki lahan untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha.

Di tengah keterbatasan tersebut, dua KDMP di Kabupaten Serang mulai memanfaatkan lahan milik Perhutani sebagai alternatif lokasi pengembangan koperasi.

Kedua koperasi tersebut berada di Desa Telaga Warna, Kecamatan Pabuaran, dan Desa Salira, Kecamatan Pulo Ampel.

Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoumperindag) Kabupaten Serang, Mokhamad Rifki, mengatakan hingga saat ini baru dua desa yang mengajukan pemanfaatan lahan Perhutani. "Iya, sementara dua kecamatan yang mengajukan ke kita, Kecamatan Pabuaran Desa Telaga Warna dan Desa Salira Kecamatan Pulo Ampel," kata Rifki, Jumat (26/6/2026).

Menurut Rifki, penggunaan lahan Perhutani untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih telah memiliki dasar hukum dan diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Perhutani, pemerintah daerah dapat mengusulkan pemanfaatan kawasan hutan dengan luasan tertentu untuk mendukung program koperasi desa.

"Perhutani memperbolehkan penggunaan lahan di bawah lima hektare. Untuk kebutuhan koperasi desa umumnya hanya sekitar 1.000 meter persegi sehingga masih memungkinkan," ujarnya.

Meski demikian, pemanfaatan lahan Perhutani harus melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 yang telah diubah melalui Peraturan Menteri LHK Nomor 20 Tahun 2025. Pengajuan dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah desa, kecamatan, bupati hingga gubernur sebelum memperoleh persetujuan penggunaan lahan. "Baru 49 KDMP yang rampung dibangun," katanya.

Data Diskoumperindag Kabupaten Serang menunjukkan perkembangan sarana pendukung KDMP masih bervariasi.

Dari total 326 KDMP yang telah terbentuk: Sebanyak 49 KDMP telah memiliki bangunan yang terbangun 100 persen. Sebanyak 98 KDMP masih dalam proses pembangunan. Sebanyak 37 KDMP telah memiliki lahan siap bangun dan sebanyak 142 KDMP belum memiliki lahan. "Kita masih mencari solusi atas permasalahan tersebut," ungkapnya.

Data tersebut menunjukkan hampir 44 persen KDMP di Kabupaten Serang masih menghadapi persoalan ketersediaan lahan. Karena itu, pemerintah daerah menawarkan opsi pemanfaatan lahan Perhutani kepada desa-desa yang belum memiliki lahan sendiri.

"Sudah kami sampaikan kepada seluruh desa. Desa yang membutuhkan lahan dan ingin menggunakan lahan Perhutani dipersilakan mengajukan. Namun sejauh ini baru dua desa yang mengajukan," ujar Rifki.

Selain penggunaan lahan perhutani, Rifki juga meminta agar desa dapat berinovasi dalam penyediaan lahan untuk pembangunan KDMP di masing-masing desa nya. "Kita sarankan agar memiliki inovasi. Mudah-mudahan ini segera ada solusinya," pungkas Rifki.

Sementara Koordinator Komunitas Olah Pikir Berbasis Nalar (Kopi Nalar), Rizal Fauzi, mendesak Pemerintah Kabupaten Serang untuk melakukan akselerasi nyata terkait penyediaan lahan bagi KDMP. Menanggapi adanya 142 koperasi desa yang hingga kini belum memiliki lahan operasional, Rizal menilai kondisi ini sebagai alarm keras bagi pemangku kebijakan agar tidak terjebak dalam kelambanan birokrasi.

"Pemanfaatan lahan Perhutani berdasarkan Permen LHK memang sah secara hukum. Namun jalur birokrasi

Namun, jalur birokrasi yang harus ditempuh secara berjenjang dari tingkat Desa, Kecamatan, Bupati, hingga Gubernur jangan sampai menjadi 'jebakan batman' yang membuat program ekonomi kerakyatan ini mangkrak bertahun-tahun," kata Rizal.

Lebih lanjut, Rizal meminta agar pemerintah daerah memberikan pendampingan total secara administratif dan tidak membebaskan seluruh proses birokrasi ini kepada perangkat desa. Menurutnya, luasan lahan sekitar 1.000 meter persegi mungkin tergolong kecil bagi Perhutani, namun proses pengajuannya bisa sangat melelahkan bagi tingkat desa jika tanpa pengawasan khusus.

Kopi Nalar juga menyoroti aspek perencanaan awal program ini, mengingat persentase KDMP yang belum memiliki lahan masih berkisar di angka 44 persen. "Kami mendukung penuh langkah awal pemanfaatan hutan negara seperti di Desa Telaga Warna dan Desa Salira. Namun ingat, ada 140 desa lainnya yang saat ini masih menunggu kepastian. Pemerintah daerah harus menjemput bola, jangan biarkan semangat ekonomi warga desa layu sebelum berkembang hanya karena kendala tanah," tegas Rizal. **(Pung/Red)**



Dana Bantuan Parpol Tahun Depan Naik Beban APBD Kabupaten Serang Bertambah

TOTAL BANTEN - Di tengah besarnya tekanan belanja daerah yang harus ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang, pemerintah daerah bersiap menambah alokasi anggaran untuk bantuan keuangan partai politik pada tahun anggaran 2027. Kenaikan itu memang memiliki dasar hukum yang jelas, namun memunculkan pertanyaan mengenai prioritas fiskal daerah dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Serang saat ini mengalokasikan bantuan keuangan partai politik sebesar Rp2,66 miliar pada APBD 2026. Dana tersebut disalurkan kepada sembilan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Serang, yakni Golkar, Gerindra, PKB, PPP, NasDem, PAN, PKS, PDI Perjuangan, dan Demokrat. Namun, angka tersebut dipastikan bertambah mulai 2027. Penyebabnya adalah terbitnya Keputusan Gubernur Banten Nomor 252 Tahun 2026 yang menyetujui kenaikan nilai bantuan keuangan partai politik dari Rp3.000 menjadi Rp4.000 per suara sah berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2024.

Kenaikan sebesar Rp1.000 per suara itu tampak kecil. Akan tetapi, jika dikalikan dengan total suara sah yang menjadi dasar perhitungan bantuan, kebutuhan anggaran yang harus disiapkan Pemkab Serang diperkirakan meningkat menjadi sekitar Rp3,5 miliar pada 2027. Di atas kertas, tambahan anggaran hampir Rp900 juta tersebut mungkin tidak terlihat signifikan dibandingkan total APBD Kabupaten Serang yang mencapai lebih dari Rp3 triliun.

Namun dalam perspektif tata kelola fiskal, setiap tambahan belanja tetap menjadi beban baru yang harus ditanggung pemerintah daerah di tengah banyaknya kebutuhan pelayanan publik yang belum sepenuhnya terpenuhi. Kabupaten Serang masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari kualitas layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, penanganan kemiskinan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam situasi demikian, setiap keputusan menambah pos belanja daerah akan selalu berhadapan dengan pertanyaan klasik: apakah anggaran tersebut telah memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat?

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Serang, Dikdik Abdul Hamid, menjelaskan bahwa kenaikan bantuan keuangan partai politik telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018. Menurut dia, penyesuaian nilai bantuan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh pemerintah kabupaten.

"Berdasarkan Permendagri, penyesuaian nilai bantuan ditinjau dari kemampuan keuangan daerah. Untuk kabupaten dan kota, persetujuannya ditetapkan melalui keputusan gubernur," ujarnya, Rabu (24/6/2026). Ia menjelaskan, sebelum usulan kenaikan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Banten, terlebih dahulu dilakukan kajian dan verifikasi yang melibatkan sejumlah perangkat daerah, mulai dari Asisten Daerah, Inspektorat, BPKAD, hingga Kesbangpol. Secara normatif, bantuan keuangan kepada partai politik memang dimaksudkan untuk memperkuat fungsi pendidikan politik masyarakat.



Regulasi bahkan mengamankan agar penggunaan dana tersebut diprioritaskan untuk kegiatan pendidikan politik, kaderisasi, serta peningkatan partisipasi warga dalam kehidupan demokrasi. Persoalannya, manfaat dari penggunaan dana tersebut belum sepenuhnya terlihat di ruang publik. Ketua Forum Mahasiswa Serang Raya (FMSR), Muhamad Lutfi, menilai transparansi penggunaan bantuan keuangan partai politik masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Menurut dia, masyarakat sulit mengetahui program apa saja yang dibiayai dari dana APBD tersebut serta sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan literasi politik warga. "Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana itu digunakan dan apa manfaatnya. Karena sumber dananya berasal dari uang publik," kata Lutfi.

Ia menilai publikasi kegiatan pendidikan politik yang dilakukan partai politik masih minim. Bahkan, berdasarkan pengamatannya, sebagian besar aktivitas yang dibiayai dari bantuan keuangan tersebut tidak terdokumentasikan secara memadai dan sulit diakses masyarakat. Padahal, transparansi menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa bantuan keuangan tidak hanya berhenti pada pemenuhan administrasi dan laporan pertanggungjawaban di meja birokrasi, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Kondisi itu menjadi semakin relevan ketika nilai bantuan yang diterima partai politik terus meningkat dari tahun ke tahun. Semakin besar anggaran yang dialokasikan negara, semakin besar pula tuntutan akuntabilitas yang harus dipenuhi penerima bantuan. Dalam APBD 2026, Partai Golkar menjadi penerima bantuan terbesar dengan nilai Rp552,3 juta. Disusul Gerindra sebesar Rp393,1 juta, PKS Rp310,3 juta, PKB Rp258,4 juta, NasDem Rp256,9 juta, Demokrat Rp242 juta, PDI Perjuangan Rp234 juta, PAN Rp230,2 juta, dan PPP Rp184,3 juta.

Apabila skema baru Rp4.000 per suara mulai diterapkan pada 2027, maka nilai bantuan yang diterima masing-masing partai juga akan meningkat secara proporsional. Di satu sisi, pemerintah memiliki kewajiban menjalankan amanat regulasi mengenai bantuan keuangan partai politik sebagai instrumen penguatan demokrasi. Namun di sisi lain, publik juga berhak menagih hasil nyata dari setiap rupiah yang dikeluarkan APBD.

Karena itu, isu yang sesungguhnya bukan semata soal naik atau tidaknya bantuan keuangan partai politik. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa tambahan beban APBD tersebut berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan politik masyarakat, penguatan kaderisasi demokrasi, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Tanpa transparansi dan ukuran manfaat yang jelas, kenaikan bantuan partai politik berpotensi dipersepsikan hanya sebagai tambahan belanja rutin di tengah berbagai kebutuhan masyarakat yang masih menunggu prioritas anggaran daerah. **(Pung/Red)**



SOLUSI BISNIS DIGITAL

PEMBUATAN WEBSITE & PT PERORANGAN



**MURAH
3,5 JUTA**

Punya PT & Website
Belum dengan Pembukuan Faktur Pajak

Tingkatkan bisnis Anda dengan legalitas dan website profesional

 Contact us
087854473555
  Visit Us
Csnetwork@gmail.com





Rp59,7 Miliar APBD Kota Serang Diserap Perjalanan Dinas dan Hak Keuangan Dewan

TOTAL BANTEN - Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang menunjukkan porsi belanja yang fantastis untuk mendukung aktivitas kelembagaan dewan. Dari sejumlah pos anggaran yang tercantum dalam dokumen Sekretariat DPRD, belanja hak keuangan anggota DPRD dan perjalanan dinas menjadi dua komponen terbesar dengan total mencapai sekitar Rp59,7 miliar.

Nilai tersebut setara lebih dari 86 persen dari total empat pos anggaran utama yang meliputi hak keuangan DPRD, perjalanan dinas, makan dan minum, serta publikasi dan dokumentasi yang secara keseluruhan mencapai sekitar Rp69,19 miliar. Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman enggan menanggapi konfirmasi terkait hal tersebut. "Ke Pak Sekwan saja," singkat Muji Rohman melalui pesan singkat, Senin (6/7/2026).

Berdasarkan dokumen APBD tahun 2026, hak keuangan DPRD menjadi pos terbesar dengan nilai sekitar Rp34,6 miliar. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk tunjangan perumahan sebesar Rp13,63 miliar, tunjangan transportasi Rp10,33 miliar, tunjangan komunikasi intensif Rp5,67 miliar, tunjangan jabatan Rp1,45 miliar.

Kemudian ada juga uang representasi Rp1 miliar, tunjangan reses Rp1,41 miliar, serta dana operasional pimpinan DPRD sebesar Rp252 juta. Sementara itu, belanja perjalanan dinas mencapai sekitar Rp25,1 miliar yang tersebar pada berbagai kegiatan kedewanan.

Pos terbesar berada pada fasilitasi tugas pimpinan DPRD sebesar Rp4,33 miliar dan koordinasi serta konsultasi pelaksanaan tugas DPRD sebesar Rp2,78 miliar. Anggaran perjalanan dinas juga digunakan untuk mendukung pembahasan rancangan peraturan daerah sebesar Rp2,15 miliar, pengawasan bidang infrastruktur Rp2,12 miliar, pengawasan pemerintahan dan hukum Rp1,90 miliar.

Lalu pengawasan kesejahteraan rakyat Rp1,72 miliar, pengawasan perekonomian Rp1,57 miliar, fasilitasi badan musyawarah Rp1,55 miliar, serta penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah sebesar Rp1,38 miliar.

Di luar dua pos tersebut, Sekretariat DPRD Kota Serang juga mengalokasikan anggaran makan dan minum sekitar Rp6,83 miliar. Belanja terbesar berada pada pelaksanaan reses DPRD sebesar Rp4,05 miliar dan penyediaan bahan logistik kantor sebesar Rp1,80 miliar. Sisanya tersebar pada berbagai kegiatan rapat, administrasi, perencanaan, dan jamuan tamu. Sementara itu, anggaran publikasi dan dokumentasi DPRD mencapai sekitar Rp2,66 miliar.

Sebagian besar digunakan untuk jasa iklan, reklame, film, dan pemotretan sebesar Rp2,19 miliar. Selain itu terdapat anggaran untuk langganan jurnal, surat kabar, dan majalah sebesar Rp208,7 juta, sewa alat kantor Rp150 juta, jasa konsultansi khusus Rp90 juta, serta bahan cetak sebesar Rp24,4 juta.

Koordinator Komunitas Olah Pikir Berbasis Nalar (Kopi Nalar), Rizal Fauzi, menilai besarnya anggaran hak keuangan dan perjalanan dinas DPRD Kota Serang harus diimbangi dengan ukuran kinerja yang jelas dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Publik tentu tidak hanya melihat besar kecilnya anggaran, tetapi juga hasil yang dihasilkan dari anggaran tersebut. Jika hampir Rp60 miliar dialokasikan untuk hak keuangan dan perjalanan dinas, maka DPRD perlu menunjukkan indikator kinerja yang terukur, mulai dari kualitas pengawasan, produk legislasi, hingga penyelesaian persoalan masyarakat," kata Rizal.

Menurutnya, transparansi penggunaan anggaran menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik. "Prinsipnya sederhana, semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula kewajiban untuk mempertanggungjawabkan manfaatnya kepada warga Kota Serang," ujar Rizal. Rizal menambahkan, di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi banyak pemerintah daerah, setiap rupiah belanja publik harus berorientasi pada manfaat dan dampak.

"Akuntabilitas bukan hanya soal laporan keuangan yang tertib, tetapi juga tentang seberapa besar anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat," tutur Rizal. **(Eks/Red)**

Di Tengah Tuntutan Kerja

Luangkan Waktu Merepres Otak

Di balik padatnya agenda politik dan pemerintahan yang dijalani setiap hari, Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum tetap berupaya menjaga keseimbangan antara pekerjaan, kesehatan, dan kehidupan keluarga.

TOTAL BANTEN - Kesibukan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Serang membuat Bahrul Ulum hampir setiap hari bergelut dengan rapat, agenda politik, hingga menerima berbagai aspirasi masyarakat. Namun, di tengah tuntutan pekerjaan yang tinggi, politikus Partai Golkar itu memiliki cara sederhana untuk menjaga kebugaran fisik sekaligus menyegarkan pikiran. Bahrul Ulum mengaku rutin menyempatkan diri bermain badminton bersama rekan-rekannya pada malam hari.

Aktivitas olahraga ringan tersebut menjadi salah satu cara untuk melepas penat setelah seharian menjalankan tugas sebagai pimpinan legislatif. "Biasanya saya sempatkan main fun game badminton setiap malam. Selain olahraga, itu juga menjadi cara untuk menyegarkan pikiran setelah aktivitas yang cukup padat," kata Bahrul Ulum kepada **Total Banten**, Selasa (21/7/2026).

Tak hanya berolahraga, pria yang dikenal dekat dengan masyarakat itu juga memilih menghabiskan waktu dengan berkumpul bersama warga di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, suasana santai dan obrolan ringan bersama masyarakat mampu mengurangi tekanan pekerjaan yang dihadapi setiap hari. Selain itu, Bahrul Ulum berupaya menyediakan waktu khusus bagi keluarga. Di sela-sela kesibukannya, ia mengaku selalu berusaha meluangkan waktu pada akhir pekan untuk bercengkrama bersama anak-anak. "Kalau akhir pekan saya usahakan bisa lebih banyak bersama anak-anak. Bagi saya, itu sudah cukup untuk me-refresh pikiran," ujarnya.

Politikus yang lahir dari keluarga sederhana di Kecamatan Cerenang itu meyakini keseimbangan antara pekerjaan, kesehatan, dan keluarga menjadi kunci menjaga produktivitas. Pengalaman hidupnya yang pernah menggembala kerbau dan membantu orang tua berjualan ikan membuatnya terbiasa menjalani kehidupan secara sederhana.

Menurut Bahrul, menjaga pola hidup sehat tidak harus dilakukan dengan cara yang rumit. Yang terpenting adalah menjaga pola makan dan rutin berolahraga.

"Imbangi pola makan yang baik dan olahraga secara teratur saja. Itu sudah cukup untuk menjaga kesehatan," tuturnya.

Bagi Bahrul Ulum, menjaga kesehatan mental dan fisik menjadi hal penting agar tetap dapat menjalankan amanah sebagai Ketua DPRD Kabupaten Serang secara optimal. Di tengah padatnya aktivitas politik dan pemerintahan, waktu bersama keluarga, olahraga, dan berinteraksi dengan masyarakat menjadi "ruang jeda" yang membuat pikirannya tetap segar dan fokus dalam bekerja. **(Pung)**



Truk Tambang Masih Beroperasi di Siang Hari

Kepgub Banten Hanya Jadi Aturan di Atas Kertas



Jalan Raya Bojonegara-Puloampel

TOTAL BANTEN - Deru mesin truk tambang memecah suasana siang di Kabupaten Serang bagian barat. Satu per satu kendaraan bertonase besar melintas membawa muatan material. Di belakangnya, kepulan debu beterbangan, menutupi pandangan pengendara yang melintas dari arah berlawanan. Panas dan pengap begitulah rasanya.

Bagi pengendara sepeda motor, Abdul kondisi itu bukan sekadar gangguan kenyamanan. Ia harus memperlambat laju kendaraan, menjaga jarak lebih jauh, dan sesekali menepi ketika debu yang terangkat dari badan jalan membuat jarak pandang berkurang. "Pakaian yang saya kenakan langsung kotor, panas dan pengap rasanya kena debu dari truk-truk itu," kata pria yang akrab disapa Adul kepada Total Banten, Minggu (5/7/2026).

Pemandangan itu masih mudah ditemukan di sejumlah ruas jalan Kabupaten Serang, meski Pemerintah Provinsi Banten telah menerbitkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 567

Tahun 2025 tentang pembatasan jam operasional dan jalur kendaraan angkutan tambang mineral bukan logam dan batuan. Dalam aturan tersebut, kendaraan tambang hanya diperbolehkan beroperasi mulai pukul 22.00 hingga 05.00 WIB. Namun di lapangan, truk-truk tambang masih terlihat melintas pada siang hari, terutama di ruas Jalan Raya Cilegon-Kramatwatu dan Bojonegara-Puloampel. Bagi Adul, situasi itu menjadi tantangan tersendiri.

Ukuran kendaraan yang jauh lebih besar membuat ruang gerak semakin terbatas, terutama ketika truk melintas beriringan atau saat jalan sedang padat. "Percuma ada aturan tapi tidak ada penegakan dari pemerintahnya," ungkapnya. Warga sekitar, Saeful Yani menyebut aktivitas kendaraan tambang masih berlangsung hampir sepanjang hari. Ia dan warga lainnya merasa terganggu dengan kondisi tersebut. "Itu lihat rumah-rumah warga berdebu semua," kata dia.

Keluhan masyarakat terhadap aktivitas angkutan tambang bukan persoalan baru. Selain kemacetan, warga juga mengeluhkan debu yang menempel di rumah-rumah, kerusakan jalan akibat kendaraan bertonase besar, serta meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas. Pada jam berangkat kerja dan sekolah, truk bermuatan material tambang masih bercampur dengan kendaraan pribadi, sepeda motor, dan angkutan umum. Kondisi tersebut membuat pengguna jalan, terutama pengendara roda dua, berada pada posisi yang lebih rentan.

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimiyati Natakusumah bahkan menyatakan akan turun langsung melakukan penertiban setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Banten. "Saya kesel banget itu terhadap truk-truk itu. Nanti saya akan turun. Kalau perlu saya stop. Nanti saya koordinasi dulu dengan Polda," kata Dimiyati, Kamis kemarin. **(Dir/Red)**



Tebing Koja

Kawasan wisata alam Tebing Koja, yang juga dikenal dengan sebutan Kandang Godzilla, menawarkan lanskap unik yang sulit ditemukan di tempat lain di Tangerang. Deretan tebing batu yang menjulang kokoh berpadu dengan hamparan pepohonan hijau, menciptakan panorama alam yang memanjakan mata.

Dari puncak hingga kaki tebing, pengunjung akan disuguhi pemandangan dinding batu hasil proses alam yang membentuk lekukan-lekukan eksotis. Keindahan tersebut semakin lengkap dengan aliran sungai yang berkelok di antara kawasan tebing serta hamparan sawah hijau yang membentang di sekitarnya.

Pesona alam yang masih asri menjadikan Tebing Koja sebagai salah satu destinasi favorit para pencinta fotografi.

Berbagai sudut kawasan ini kerap dimanfaatkan sebagai lokasi berburu foto, mulai dari foto prewedding, konten media sosial, hingga sekadar mengabadikan momen liburan bersama keluarga dan sahabat.

Saat pagi atau menjelang senja, panorama Tebing Koja terlihat semakin menawan. Cahaya matahari yang menyinari dinding-dinding batu menciptakan gradasi warna yang dramatis, menghadirkan suasana tenang sekaligus memukau bagi setiap pengunjung yang datang.

Telaga Biru Cisoka

Telaga Biru Cisoka menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik perhatian di Kabupaten Tangerang. Sesuai namanya, tempat ini menawarkan pemandangan telaga dengan gradasi warna biru yang memikat, berpadu dengan suasana tenang yang cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk aktivitas sehari-hari.

Air telaga yang terlihat jernih dengan warna khasnya menciptakan panorama yang memanjakan mata. Di sekeliling kawasan, pengunjung dapat menikmati udara segar sambil berjalan santai, berolahraga ringan, atau sekadar duduk menikmati keindahan alam yang tersaji.

Keunikan warna air dan lanskap di sekitarnya menjadikan Telaga Biru Cisoka sebagai salah satu lokasi favorit untuk berburu foto. Berbagai sudut telaga menawarkan latar yang menarik bagi pengunjung yang ingin mengabadikan momen bersama keluarga, sahabat, maupun untuk kebutuhan konten media sosial.





Scientia Square Park

Scientia Square Park (SQP) menjadi salah satu destinasi wisata keluarga yang menawarkan perpaduan antara rekreasi dan edukasi di Tangerang. Kawasan ini dirancang sebagai ruang terbuka yang ramah anak, dengan beragam aktivitas interaktif yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendukung perkembangan motorik, kreativitas, dan kemampuan kognitif.

Di dalam area taman, anak-anak dapat mencoba berbagai wahana edukatif yang mengajak mereka belajar sambil bermain. Mulai dari merasakan pengalaman bermain di area persawahan, menjelajahi jalur bike trail, menantang adrenalin di wahana wall climbing, hingga berinteraksi dengan alam melalui berbagai aktivitas luar ruangan lainnya.

Hamparan ruang hijau yang luas membuat suasana di Scientia Square Park terasa nyaman untuk keluarga. Orang tua dapat mengawasi anak-anak bermain sambil menikmati udara segar dan lingkungan yang tertata rapi. Beragam fasilitas yang tersedia juga menjadikan kawasan ini cocok sebagai pilihan rekreasi akhir pekan maupun destinasi liburan sekolah.

Scientia Square Park

Branchsto Equestrian Park menawarkan pengalaman wisata yang berbeda dibandingkan destinasi rekreasi pada umumnya. Di tempat ini, pengunjung dapat merasakan sensasi menunggang kuda di area yang dirancang menyerupai kawasan peternakan modern, menjadikannya pilihan menarik untuk liburan keluarga maupun aktivitas bersama teman.

Salah satu daya tarik utama Branchsto adalah kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan kuda, mulai dari berkuda santai hingga mengenal lebih dekat dunia equestrian. Bagi pengunjung yang menyukai aktivitas luar ruang, tersedia pula wahana ATV yang memungkinkan mereka menjelajahi area wisata dengan pengalaman yang lebih menantang. Tak hanya menawarkan aktivitas rekreasi, Branchsto Equestrian Park juga dilengkapi fasilitas kuliner yang dapat menjadi tempat beristirahat setelah berkeliling. Beragam hidangan tersedia, mulai dari menu khas Nusantara hingga sajian bergaya western yang dapat dinikmati bersama keluarga. Dengan konsep wisata edukasi, petualangan, dan kuliner dalam satu kawasan, Branchsto Equestrian Park menjadi salah satu destinasi favorit di Tangerang bagi pengunjung yang ingin menikmati pengalaman liburan yang lebih beragam.





Sate Bandeng

Sate bandeng bukan sekadar kuliner khas Banten, melainkan bagian dari warisan sejarah yang telah bertahan selama berabad-abad. Hidangan ini dipercaya sudah dikenal sejak masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, sultan pertama Kesultanan Banten, pada abad ke-16.

Berbeda dengan sate pada umumnya, sate bandeng diolah melalui proses yang cukup rumit. Daging ikan bandeng dipisahkan dari durinya, kemudian dihaluskan dan dicampur berbagai rempah khas sebelum dimasukkan kembali ke dalam kulit ikan. Setelah itu, bandeng dibakar hingga menghasilkan aroma yang menggugah selera.

Rabeg

Di antara beragam kuliner tradisional Banten, rabeg menempati posisi istimewa sebagai hidangan yang kaya cita rasa dan sarat sejarah. Masakan ini berbahan dasar daging kambing atau sapi, lengkap dengan jeroannya, yang dimasak dalam kuah kental bercita rasa gurih, pedas, dan kaya rempah.

Keistimewaan rabeg terletak pada racikan bumbunya. Lada, jahe, bawang merah, kayu manis, serta berbagai rempah pilihan lainnya berpadu menghasilkan aroma yang kuat dan menggugah selera. Proses memasak yang dilakukan dalam waktu cukup lama membuat bumbu meresap sempurna ke dalam daging sehingga menghasilkan tekstur yang empuk dan rasa yang khas.

Kuliner ini diyakini memiliki pengaruh dari tradisi kuliner Timur Tengah yang masuk ke Banten melalui jalur perdagangan dan penyebaran Islam pada masa Kesultanan Banten. Seiring waktu, masyarakat lokal mengadaptasinya dengan menambahkan kekayaan rempah Nusantara sehingga melahirkan cita rasa rabeg yang dikenal hingga saat ini.

Kini, rabeg menjadi salah satu hidangan khas yang banyak dicari wisatawan saat berkunjung ke Banten. Disajikan hangat bersama nasi putih, rabeg menawarkan perpaduan rasa gurih, manis, dan pedas yang mencerminkan kekayaan budaya kuliner masyarakat Banten dari masa ke masa.





Angeun lada merupakan salah satu kuliner tradisional khas Banten yang terkenal dengan cita rasa pedas dan kaya rempah. Hidangan berkuah ini biasanya berisi potongan daging sapi serta aneka jeroan, seperti jantung, limpa, babat, dan usus, yang dimasak hingga empuk dalam kuah berbungu kuat. Nama "angeun lada" berasal dari bahasa Sunda Banten, yang secara harfiah berarti sayur atau kuah lada. Sesuai namanya, lada menjadi salah satu bumbu utama yang memberikan sensasi hangat dan rasa pedas yang khas. Beragam rempah lainnya turut ditambahkan sehingga menghasilkan kuah yang gurih dengan aroma yang menggugah selera.

Di masyarakat Banten, angeun lada kerap hadir dalam berbagai acara keluarga, perayaan adat, hingga momen hari besar keagamaan. Hidangan ini tidak hanya menjadi sajian kuliner, tetapi juga bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Saat disantap hangat bersama nasi putih, angeun lada menawarkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan rempah yang kuat. Sensasi hangat dari kuahnya membuat makanan ini sangat cocok dinikmati saat cuaca dingin atau ketika berkumpul bersama keluarga. Sebagai salah satu warisan kuliner khas Tanah Jawa, angeun lada menjadi bukti kekayaan tradisi memasak masyarakat Banten yang mampu memadukan bahan sederhana dengan rempah-rempah Nusantara menjadi hidangan bercita rasa istimewa.

Angeun Lada



BOX Redaksi

Pimpinan Perusahaan : Engkos Kosasih, **Pemimpin Redaksi:** Andre SN, **Redaktur Pelaksana :** Agus Lani **Redaktur :** Imam Maulana, Hasanudin, Fariz, **Reporter :** D. Amanda, Saepul Aripin (Ipung), Dirhat, Andre Sopian, Abdul Majid, Muhammad Lutfi, Bandi Subandi, **Desain Grafis :** PT Banten Media Network

Penerbit : PT Raya Media Investama

Komplek Perumahan Citra Gading Blok Q4 nomor 3, Kelurahan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten

Kontak : Tlp/WA : 087854473555/ Email : totalbanten@gmail.com

ANGGARAN MAKAN DAN MINUM PEJABAT BANTEN RP 110 MILIAR

DI TENGAH KEMISKINAN YANG MEGHANTUI WARGA

Saat warga Banten masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, Pemerintah Provinsi Banten malah mengalokasikan anggaran Rp110 Miliar untuk belanja makan dan minum pejabat. Di sisi lain, anggaran untuk bantuan sosial warga miskin cuma Rp18 miliar.

“Ada desain penganggaran yang melibatkan eksekutif dan legislatif. Masalahnya bukan soal pemangkasan, tapi perencanaan anggaran sejak awal sudah salah, tidak diarahkan untuk prioritas rakyat

Prioritas siapa yang sebenarnya sedang dijalankan ?

FAKTA APBD BANTEN 2026



BELANJA MAKAN DAN MINUM

RP 110,44 MILIAR

Rapat	Rp30,75 Miliar
Jamuan Tamu	Rp46,78 Miliar
Pendidikan	Rp25,24 Miliar
Makan dan Minum Lainnya	Rp7,67 Miliatr

Sumber ; APBD Banten 2026

